

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DESA AURSATI,
KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Studi
SI Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

PELITA PEBRIANTI

NIM. 12270525249

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2026



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Pelita Pebrianti
 : 12270525249
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Analisis Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada
 Desa Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING

Ikhwani Ratna, S.E, M.Si
 NIP. 198308272011012014

Mengetahui

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI
 Administrasi Negara



Dr. Desyari Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penun-
 jauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : Pelita Pebrianti
NIM : 12270525249
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Desa Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
Tanggal Ujian : 21 April 2026

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Mashuri, S.Ag., M.A

Sekretaris
 Raegen Harahap, M.A

Penguji I
 Afrizal, S.Sos, M,Si

Penguji II
 Ikhwani Ratna, S.E, M,Si

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pelita Pebrianti
 Nim : 12270525249
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Tengah, 27 Februari 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DESA AURSATI, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 April 2026

Yang membuat pernyataan



Pelita Pebrianti
 NIM. 12270525249

***pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DESA AURSATI, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR.

Oleh:

Pelita Pebrianti
NIM. 1227052524

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan pemerintah Indonesia sejak 2007 merupakan upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial keluarga miskin, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Topik ini dipilih karena meskipun PKH telah menunjukkan dampak positif seperti pengurangan beban pengeluaran rumah tangga dan perubahan perilaku penerima manfaat, pelaksanaannya masih dihadapkan pada masalah ketidaktepatan sasaran, di mana dari 360 kepala keluarga (KK) miskin pada 2024, hanya 125 KK yang menerima bantuan, menyebabkan ketidakmerataan dan konflik sosial akibat data DTKS yang outdated serta minimnya verifikasi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 17 informan (termasuk aparat desa, penerima, dan non-penerima PKH), observasi langsung, serta dokumentasi sekunder seperti profil desa dan regulasi Permensos RI No. 1/2018, dianalisis berdasarkan indikator evaluasi kebijakan Dunn (2003): efektivitas, efisiensi, ketepatan, pemerataan, dan responsivitas. Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan PKH cukup efektif bagi penerima terdaftar dalam memenuhi kebutuhan dasar anak sekolah dan kesehatan balita, namun efisiensi rendah akibat keterlambatan pencairan dana, ketepatan sasaran lemah karena pengaruh relasi sosial dan data tidak valid.

Kata Kunci: Analisis, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) SOCIAL ASSISTANCE IN AURSATI VILLAGE, TAMBANG DISTRICT, KAMPAR REGENCY.

By:

Pelita Pebrianti
NIM. 1227052524

The Family Hope Program (PKH), launched by the Indonesian government in 2007 as a conditional cash transfer initiative, represents a strategic effort to alleviate poverty by enhancing access to education, health services, and social welfare for poor families, particularly in rural areas such as Aursati Village, Tambang District, Kampar Regency. This topic was selected due to PKH's proven positive impacts, including reduced household expenditure burdens and behavioral changes among beneficiaries, yet its implementation faces persistent challenges in targeting accuracy, where only 125 out of 360 poor households (KK) in 2024 received aid, leading to inequities and social conflicts stemming from outdated DTKS data and limited field verification. Employing a qualitative descriptive approach, this study gathered data through in-depth interviews with 17 informants (including village officials, beneficiaries, and non-beneficiaries), direct observations, and secondary documentation such as village profiles and Minister of Social Affairs Regulation No. 1/2018, analyzed using Dunn's (2003) policy evaluation indicators: effectiveness, efficiency, accuracy, equity, and responsiveness. Findings reveal that PKH implementation is moderately effective for registered recipients in meeting basic schooling and toddler health needs, but suffers from low efficiency due to delayed fund disbursements, weak targeting accuracy influenced by social relations and invalid data.

Keywords: Analysis, Implementation of Family Hope Program

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Negeri Sulta Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DESA AURSATI, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR.”**

Selanjutnya shalawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Penulisan skripsi diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam keterbatasan pengetahuan dan pengamalan penulis. Teruntuk Cinta Pertamaku Irpandi Ayah Hebatku terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis. Teruntuk Ibunda tercinta, Teti Hendra sosok luar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanannya tanpa henti. Terima kasih atas cinta yang tak tergantikan, Terimakasih atas doa yang selalu menembus langit setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan Kesehatan dan kebahagiaan kepada ibunda. Panjang umur dan temani setiap langka yang penulis lakukan.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., S.E., M.Si., Ak, CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Hendry, S.E., M.Si., Ak, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyiah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc.Sc., selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara.
8. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat, Sekaligus Sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis.
9. Adik tercinta, Jelita aura kasih, Attar Irga Mahendra, yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi, Semoga kelak kalian juga bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya.
10. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Wahyu Riadi S.Sos. Terima kasih telah menjadi bagian mulai dari awal memasuki dunia perkuliahan sampai dalam proses penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, materi, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
11. Seluruh Keluarga tercinta Yang tidak bisa penulis sebut nama nya satu persatu dan Adek ibunda penulis yaitu ibu Suryati terkhusus yang telah banyak bantu dan memberi semangat kepada Penulis memberikan dukungan, bantuan dan doa serta hiburan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Nurul salamiah dan maria Dani yang menjadi sahabat penulis sejak awal masa perkuliahan. Segala canda, tawa, suka, sedih, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Bersama kalian, hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang. Penulis merasa sangat bersyukur dipertemukan oleh orang yang tulus, setia, dan ceria seperti kalian. Terima kasih telah bertahan di sisi penulis di kala banyak masalah yang dihadapi bersama. Kalian bukan sekadar teman, tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis.

13. Kepada sahabat tercinta penulis, Yuni rahayu dan rahmadani Aziz, dua orang yang selalu jadi tempat penulis berkeluh kesah selama masa perkuliahan, dua orang yang paling tau bagaimana kondisi mental penulis, dan dua orang yang turut melihat langsung perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Banyak ucapan terima kasih untuk kalian yang tidak bisa penulis tuliskan hanya dengan kata-kata sederhana. Semoga Allah memudahkan dan Allah berkahi perjalanan dan perjuangan kalian saat ini dan untuk selamanya.

Pekanbaru, April 2026

Pelita Pebrianti
1227052549



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.2 Jenis-jenis Kebijakan Publik	12
2.3 Indikator	13
2.4 Kemiskinan.....	14
2.5 Penyebab Kemiskinan	15
2.6 Program Penyaluran Bantuan PKH.....	17
2.7 Pandangan Islam Tentang Penyaluran Bantuan PKH.....	20
2.8 Tujuan dan Manfaat Penerima Bantuan Sosial PKH	21
2.9 Penelitian Terdahulu	24
2.10 Konsep Operasional	25
2.11 Kerangka Berpikir	27
2.12 Fokus Penelitian	28
2.13 Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi dan Waktu Peneitian.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Informasi Penelitian	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Analisis Data	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
	4.1 Sejarah Desa Aursati	35
	4.2 Keadaan Geografis	36
	4.3 Agama	37
	4.4 Pendidikan	38
	4.5 Mata Pencarian	39
	4.6 Visi dan Misi	40
	4.7 Kondisi Pemerintahan Desa	41
	4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	42
BAB V	HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	5.1 Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.....	44
	5.2 Efisiensi Pelaksanaan Program	46
	5.3 Ketetapan Sasaran	47
	5.4 Pemerataan Bantuan	49
	5.5 Responsivitas Terhadap Keluhan Masyarakat	51
	5.6 Faktor Penghambat Utama PKH Di Desa Aursati	52
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	56
	6.1 Kesimpulan.....	56
	6.2 Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	7
Tabel 2.1.....	24
Tabel 2.2.....	26
Tabel 3.1.....	31
Tabel 4.1.....	38
Tabel 4.2.....	38
Tabel 4.3.....	39
Tabel 4.4.....	39
Tabel 4.5.....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus Pengembangan Kebijakan di Bidang Perlindungan Sosial, tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Bantuan Tunai Bersyarat atau disebut dengan Conditional Cash Transfers (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi Negara-negara tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada tingkat Kabupaten dimulai pada tahun 2007, di tingkat Kecamatan dan Desa pada tahun 2011. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program Keluarga Harapan (Pedoman Umum PKH: 2012) merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan bersyarat dan disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals atau MDGs).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu. Dengan PKH diharapkan Peserta PKH (selanjutnya disebut Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban yang dibidang kesehatan dan pendidikan. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita. Di bidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan (SD s.d SLTP/SMP). Program Keluarga Harapan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Berdasarkan Pasal 6 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, penerima bantuan sosial PKH berhak mendapatkan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bantuan Sosial PKH berupa uang, barang, atau jasa
2. Pendampingan Sosial
3. Pelayanan di Fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial
4. Program Bantuan Komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam Pasal 7 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang PKH,

keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban:

1. Keluarga Penerima manfaat PKH Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak balita berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak berusia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun
3. Mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
4. Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses berkewajiban:
 - a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khusus dan/atau petugas pelayanan kesehatan yang disetarakan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak balita berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan khusus bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- c. Memberikan perawatan terhadap anggota keluarga lanjut usia dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan Pasal 3 Permensos RI No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan sasaran penerima bantuan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam Pasal 5 Permensos RI No. 10 Tahun 2017 Kriteria komponen kesehatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 meliputi:

1. Ibu hamil/ menyusui
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun Kriteria Komponen

Pendidikan meliputi:

- a. Anak SD/MI atau sederajat
- b. Anak SMP/MTS atau sederajat
- c. Anak SMA/MA atau sederajat.
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan Pasal 25 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan bahwa Pelaksana Program Keluarga Harapan dilakukan oleh



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinas/instansi sosial tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi bantuan sosial Program Keluarga Harapan, perlindungan, dan jaminan sosial.

Pelaksana Program Keluarga Harapan daerah kabupaten/ kota dalam Pasal 25 ayat (4) bertugas:

1. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan
2. Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan
3. Memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai dengan rencana
4. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang timbul di lapangan
5. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan
6. Melaporkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan daerah kabupaten/kota kepada pelaksana Program Keluarga Harapan provinsi dengan tembusan kepada pelaksana Program Keluarga Harapan daerah pusat yang terdapat dalam Pasal 41 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan Berdasarkan dalam Pasal 25 ayat (4) Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017

Tentang Program Keluarga Harapan tersebut, sebagaimana yang dimaksud sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan daerah Kabupaten/kota dilakukan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

oleh Dinas Sosial Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan yaitu :

1. Penetapan lokasi Program Keluarga Harapan
2. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)
3. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
4. Verifikasi komitmen kewajiban keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan
5. Transformasi kepesertaan program keluarga harapan
6. Pengakhiran bantuan sosial program keluarga harapan dan pendampingan. PKH akan memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk jangka pendek, PKH akan memberikan income effect kepada RTSM/KSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect anak keluarga miskin (serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insuranceeffect). Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendanya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Indonesia no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan mengeluarkan langkah-langkah penangan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
2. Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langka koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 1.1

Daftar Penerima Bantun PKH di Desa Aursati Kecamatan tambang Kabupaten Kampar 2020-2024.

Tahun	Jumlah KK Desa Aursati	Jumlah kk Miskin	Jumlah kk Penerimaan Bantuan Sosial(PKH)
2020	650	280	160
2021	670	300	150
2022	690	320	140
2023	710	340	130
2024	726	360	125

Sumber: data oleh peneliti di kantor desa aursati

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk di Desa Aursati 726 KK dan yang tergolong dalam keluarga miskin sebanyak 360 KK sedangkan yang mendapatkan program bantuan PKH sebanyak 125 KK.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena tingginya angka kemiskinan maka pemerintah membuat program PKH. Bantuan PKH seharusnya bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan sehingga mereka benar-benar bisa tertolong dari kemiskinan. Sehingga anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah. Mengenai kevalidatan data kelayakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), karena pendataan dan penentuan prioritas sasaran dan program ini belum tepat sasaran. Pendataan RTSM yang dilakukan oleh pihak DTKS hanya menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2019. Sehingga pendamping sampai saat ini masih mempertanyakan hal tersebut.

Adapun permasalahan yang ada di Desa Aursati Kecamatan tambang Kabupaten Kampar

1. Belum meratanya penerimaan bantuan PKH. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
2. Kurangnya pengawasan mengenai Program Keluarga Harapan, sehingga ada keluarga yang sangat membutuhkan bantuan PKH tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Seharusnya Program Keluarga Harapan benar-benar memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DESA AURSATI, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor-faktor hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua bidang, yaitu secara teoritis dan praktis, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan sosial, khususnya dalam konteks evaluasi program bantuan sosial terkait ketepatan sasaran dan pemerataan distribusi.
 2. Menjadi sumber referensi bagi akademisi maupun peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan, terutama dalam bidang pengelolaan program bantuan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat:

Memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima bantuan dengan diharapkan terwujudnya distribusi bantuan yang lebih adil dan sesuai kebutuhan mereka.

2. Bagi Pemerintah:

Membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial di Desa Aursati, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial dapat meningkat.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kebijakan publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Sedangkan menurut Fredrich dalam Agustino, (2017:166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do)”. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Menurut Abdul Wahab (2005),

kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sutu rangkayan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

2.2 Jenis-Jenis Kebijakan publik

Menurut James Anderson yang dikutip Suharno (2010:24-25) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif dan kebijakan procedural Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.
2. Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik Kebijakan materal merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat
Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.3 Indikator

Menurut William Dunn (2003), dalam menganalisis ada lima kriteria yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu: (Hasanah, N. 2023)

1. Efektivitas

Menilai sejauh mana kebijakan mencapai hasil yang diharapkan dan tujuan yang diinginkan, dengan fokus pada rasionalitas teknis dan pengukuran output atau layanan.

2. Efisiensi

Menilai besarnya upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas terintu, dengan fokus pada penghematan biaya dan sumber daya, serta diukur dari aspek ekonomi

3. Pemerataan

Menilai distribusi dampak dan upaya antara berbagai kelompok masyarakat, dengan tujuan mencapai keadilan dan distribusi yang merata dalam kebijakan yang diterapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Responsivitas

Menilai sejauh mana kebijakan dapat menjawab kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Bahkan kebijakan yang dianggap efektif dan efisien dapat dianggap gagal jika tidak sepenuhnya menanggapi kebutuhan asli masyarakat yang seharusnya dilayani

5. Ketepatan

Menilai kelayakan dan dasar tujuan program, serta kekuatan asumsi yang mendasarinya, dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara menyeluruh untuk menentukan ketepatan dan rasionalitasnya.

2.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan yang dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan yang semestinya. Biasanya kemiskinan didefinisikan sebagai mana suatu individu berada di tingkat standar minimal sebuah kehidupan yang dapat diterima dalam masyarakat atau komunitas. Menurut Munawar beliau berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multimedia yang didefinisikan serta diukur dalam banyak cara. Kasus kemiskinan sendiri telah diukur berdasarkan kesejahteraan ekonominya seperti pendapatan dan konsumsi. Seseorang dikatakan miskin bila ia berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati (Maipita, 2013). Kemiskinan sangat erat dengan adanya sebuah kebijakan sosial hal ini sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan karena sebuah kebijakan sosial muncul akibat adanya masalah sosial yakni kemiskinan. Pada Undang- Undang 13 tahun 2011



dijelaskan bahwa “fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya sendiri ataupun keluarganya”.

Menurut Jamaluddin (2017) mengatakan bahwa kemiskinan sebagai keadaan tidak mampu seseorang atau masyarakat yang mana diukur dalam standar hidup tertentu, juga mengacu pada konsep miskin relative yang melakukan analisis perbandingan di setiap negara baik negara miskin ataupun kaya. Konsep absolute dari kemiskinan sendiri adanya wabah kelaparan, ketidak mampuan untuk membesarkan maupun mendidik anak danlainnya.Dengan ini berdasarkan beberapa pandangan diatas maka pada hakikatnya kemiskinan merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas hanya pada persoalan ekonominya saja. Untuk itu dalam program pemberdayaan masyarat harusnya tidak berfokus pada ekonomi saja namun juga dalam bidang sdmnya yang mana memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosialnya agar individu atau masyarakat mampu bertahan serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.5 Penyebab Kemiskinan

Pada dasarnya kemiskinan bersumber dari Sumber Daya Manusia (SDM) serta keadaan strukturalnya artinya bahwa dengan SDM yang rendah dengan tidak berpendidikan, kurangnya skill serta kreativitas yang minim, sehingga hal inilah yang membuat individu tidak dapat bersaing dengan individu lainnya. Keadaan diskriminasi atau keadaan structural, masyarakat miskin memiliki keterbatasan akses dan kesempatan dalam mengeksplor hal baru sehingga mereka hanya ada



dilingkarkan kemiskinan tanpa bisa keluar dari hal tersebut. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kartasasmita (Jamaluddin 2017: 225), beliau mengatakan penyebab dari kemiskinan tersebut adalah:

- a. Kesehatan yang buruk. Karena keadaan yang tidak mendukung makan gizi yang didapat sangat rendah yang mana hal inilah yang menyebabkan rendahnya ketahanan fisik, daya pikir serta prakarsa individu itu sendiri.
- b. Rendahnya taraf pendidikan. Dengan pendidikan yang terbilang rendah maka kemampuan dalam pengembangan diri dan mengekspor hal baru menjadi terbatas hal inilah yang menyebabnya sempitnya lapangan kerja yang bisa dimasuki karena tidak sesuai dengan kriteri yang perusahaan inginkan. Karena pendidikan sangat penting untuk bersaing dalam mencari pekerjaan.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Selain permasalahan kondisi fisik maupun pendidikan lapangan pekerjaan juga menjadi penyebabnya, lapangan pekerjaan yang semakin sedikit serta persaingan yang sangat kuat sehingga hal ini berpeluang sangat sikit bagi individu yang tidak mampu bersaing hal inilah yang membuat terjadinya kemiskinan.
- d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6 Program Penyaluran bantuan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 sebagai upaya strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini memberikan bantuan tunai secara berkala kepada keluarga miskin dan rentan dengan syarat penerima manfaat harus memenuhi kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka mengenyam pendidikan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di keluarga penerima manfaat. PKH dirancang sebagai program perlindungan sosial yang berorientasi pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang disalurkan secara bertahap melalui bank atau pos, dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan komponen keluarga, seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD hingga SMA, penyandang disabilitas, dan lansia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong keluarga miskin agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Misalnya, penelitian di Kabupaten Jombang dan daerah lainnya mengindikasikan adanya peningkatan taraf pendidikan anak, akses layanan kesehatan, dan perbaikan gizi ibu hamil setelah keluarga tersebut menerima

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bantuan PKH. Hal ini membuktikan bahwa program ini efektif dalam mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Namun, implementasi PKH juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, di mana tidak semua keluarga miskin yang membutuhkan dapat terjangkau dengan baik. Selain itu, motivasi keluarga penerima manfaat untuk mencapai kemandirian atau "graduasi" dari program masih rendah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, fasilitator, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini dalam jangka panjang.

Pelaksanaan PKH juga menekankan pentingnya pendampingan oleh petugas khusus yang berperan mengawasi dan membimbing keluarga penerima manfaat agar memenuhi kewajiban mereka. Pendampingan ini terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program, karena membantu mengurangi kesenjangan informasi dan memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai tujuan, yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan kesehatan.

Dari sisi kebijakan, PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur kriteria penerima manfaat, besaran bantuan, serta mekanisme penyaluran. Program ini juga sejalan dengan berbagai peraturan dan undang-undang yang mendukung penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi efektivitas PKH menunjukkan bahwa program ini cukup berhasil dalam mencapai tujuan utamanya. Pengukuran efektivitas berdasarkan ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan pemantauan menunjukkan skor di atas 70%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan PKH berjalan dengan baik meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Hal ini menegaskan bahwa PKH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kabupaten.

Dampak PKH juga terlihat pada peningkatan pengeluaran pendidikan dan konsumsi keluarga penerima manfaat. Studi menggunakan metode Difference in Difference menunjukkan bahwa keluarga penerima PKH meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan anak dan konsumsi rumah tangga secara signifikan, yang berarti ada perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut. Dengan demikian, PKH tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga mendorong investasi keluarga dalam pendidikan dan kesehatan sebagai modal masa depan.

Selain dampak ekonomi dan sosial, PKH juga berkontribusi pada perubahan pola hidup dan perilaku masyarakat miskin, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga penerima manfaat, tetapi juga berdampak luas pada komunitas di sekitar mereka, sehingga program ini berperan dalam pembangunan sosial yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial yang efektif dan strategis dalam mengurangi kemiskinan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran, pendampingan yang intensif, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci agar PKH dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat dan mendukung pembangunan sosial ekonomi nasional

2.7 Pandangan Islam Tentang Penyaluran bantuan PKH

Dalam islam Program Keluarga Harapan (PKH) dari perspektif Islam dapat dilihat sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk membantu sesama, terutama kaum yang lemah dan miskin. Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial dan keadilan dalam distribusi bantuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan. Dalam konteks PKH, bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pokok, sangat sejalan dengan prinsip Islam yang mengedepankan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan.

Allah SWT menegaskan pentingnya keadilan QS.An Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, bantuan sosial juga harus dijalankan dengan prinsip amanah (kepercayaan) dan tanggung jawab. Penyaluran dana PKH yang sesuai dengan prinsip amanah akan memastikan bahwa bantuan digunakan untuk tujuan yang benar, yaitu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder keluarga miskin, bukan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan program. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi terhadap penerima manfaat sangat penting agar dana bantuan tidak disalahgunakan

2.8 Tujuan dan Manfaat penerima bantuan sosial(PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Program ini berfokus pada pemberian bantuan sosial bersyarat yang mendorong penerima manfaat untuk memenuhi kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, PKH tidak hanya memberikan bantuan ekonomi secara langsung, tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku positif yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Salah satu tujuan penting PKH adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan anak-anak usia dini. Melalui program ini, keluarga penerima didorong untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan gizi yang cukup, sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kesehatan generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, PKH bertujuan meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dengan mensyaratkan agar anak-anak tersebut bersekolah secara teratur dan menyelesaikan pendidikan wajib. Dengan bantuan ini, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang layak sehingga membuka peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan di masa depan. Manfaat yang diterima oleh keluarga penerima PKH sangat beragam. Secara langsung, mereka mendapatkan bantuan tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya sekolah, kesehatan, dan konsumsi sehari-hari. Bantuan ini membantu meringankan beban ekonomi keluarga sehingga mereka dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan penting tanpa harus terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan.

Selain bantuan finansial, penerima PKH juga mendapatkan pendampingan dari petugas sosial yang bertugas membimbing dan mengawasi agar bantuan digunakan sesuai tujuan program. Pendampingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa keluarga penerima dapat memenuhi kewajiban program, seperti membawa anak ke sekolah dan memeriksakan kesehatan secara rutin, sehingga manfaat dari bantuan benar-benar dirasakan secara optimal.

Lebih jauh, PKH membuka akses yang lebih baik bagi keluarga miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya dukungan ini, keluarga penerima dapat memanfaatkan fasilitas publik secara lebih maksimal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Hal ini juga membantu pemerintah dalam mencapai target pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program ini juga memberikan dampak positif berupa perubahan perilaku keluarga penerima manfaat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan meningkat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam masa depan anak-anaknya. Perubahan ini sangat penting untuk memutus siklus kemiskinan yang sering kali turun-temurun dalam suatu keluarga. Secara sosial, PKH memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab sosial antar anggota masyarakat. Bantuan yang diberikan tidak hanya meringankan beban individu, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan keluarga miskin agar menjadi mandiri. Program ini memberikan harapan baru bagi keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan dan berkontribusi positif dalam pembangunan nasional. Secara keseluruhan, tujuan dan manfaat PKH adalah memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, mendorong perubahan perilaku yang positif, serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Dengan demikian, PKH menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Kajian-kajian terdahulu sesuai dengan masalah yang diteliti sebagai berikut :

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Metode	Perbedaan dengan Penelitian Saya
1	Purnomo (2021) Evaluasi penyaluran BLT di Desa Lansot	BLT masih belum tepat sasaran	Deskriptif kualitatif	Fokus pada pelaksanaan PKH di Desa Aursati dengan indikator efektivitas, efisiensi, ketepatan, pemerataan, responsivitas
2	Chinti R (2021) Evaluasi BST di Kelurahan Warakas	Bantuan sosial tidak merata	Deskriptif kualitatif	Fokus pada pendampingan dan pengawasan penerima PKH
3	Pandowo, M. (2020) Evaluasi BST masa pandemi di Kota Manado	Penyaluran bansos Covid-19 salah sasaran	Deskriptif kualitatif	Penelitian mendalam terkait implementasi program PKH di tingkat desa
4	Rahman A. (2021) Evaluasi bansos Covid-19 di Makasar	Banyak exclusion/inclusion error pada bansos	Deskriptif kualitatif	Mengkaji efektivitas dan pemerataan pelaksanaan PKH serta optimalisasi mekanisme
5	Siregar R. (2020) Evaluasi PKH di Pekanbaru	Penyaluran PKH belum tepat sasaran	Deskriptif kualitatif	Fokus pada hambatan dan tantangan pelaksanaan PKH di Kabupaten Kampar
6	Setiawan D. (2021) Penyaluran bantuan sosial di Desa Suka Maju	Bantuan sosial menimbulkan kecemburuan sosial	Deskriptif kualitatif	Mengkaji responsivitas dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan PKH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Metode	Perbedaan dengan Penelitian Saya
7	Putri N. (2022) Evaluasi BST di Kabupaten Bandung Barat	Banyak warga miskin belum menerima bansos	Deskriptif kualitatif	Mengkaji optimalisasi distribusi dan evaluasi distribusi PKH
8	Andini S. (2021) Evaluasi BLT Dana Desa masa pandemi di Desa Suka Maju	BLT tidak tepat sasaran	Deskriptif kualitatif	Penelitian fokus pada ketepatan dan efisiensi program PKH
9	Handayani E. (2020) Evaluasi BST pandemi di Kecamatan Rumbai Pekanbaru	Banyak penerima bansos tidak sesuai kriteria	Deskriptif kualitatif	Menilai efektivitas prosedur dan ketepatan pelaksanaan PKH
10	Yuliana S. (2020) Evaluasi BST masa pandemi di Desa Suka Maju	Bantuan sosial tidak merata	Deskriptif kualitatif	Fokus pada pemerataan akses dan responsivitas program PKH

2.10 Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah paham dalam pemahaman teori yang di gunakan dalam penelitian ini, berikut konsep yang akan di gunakan dalam penelitian ini :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

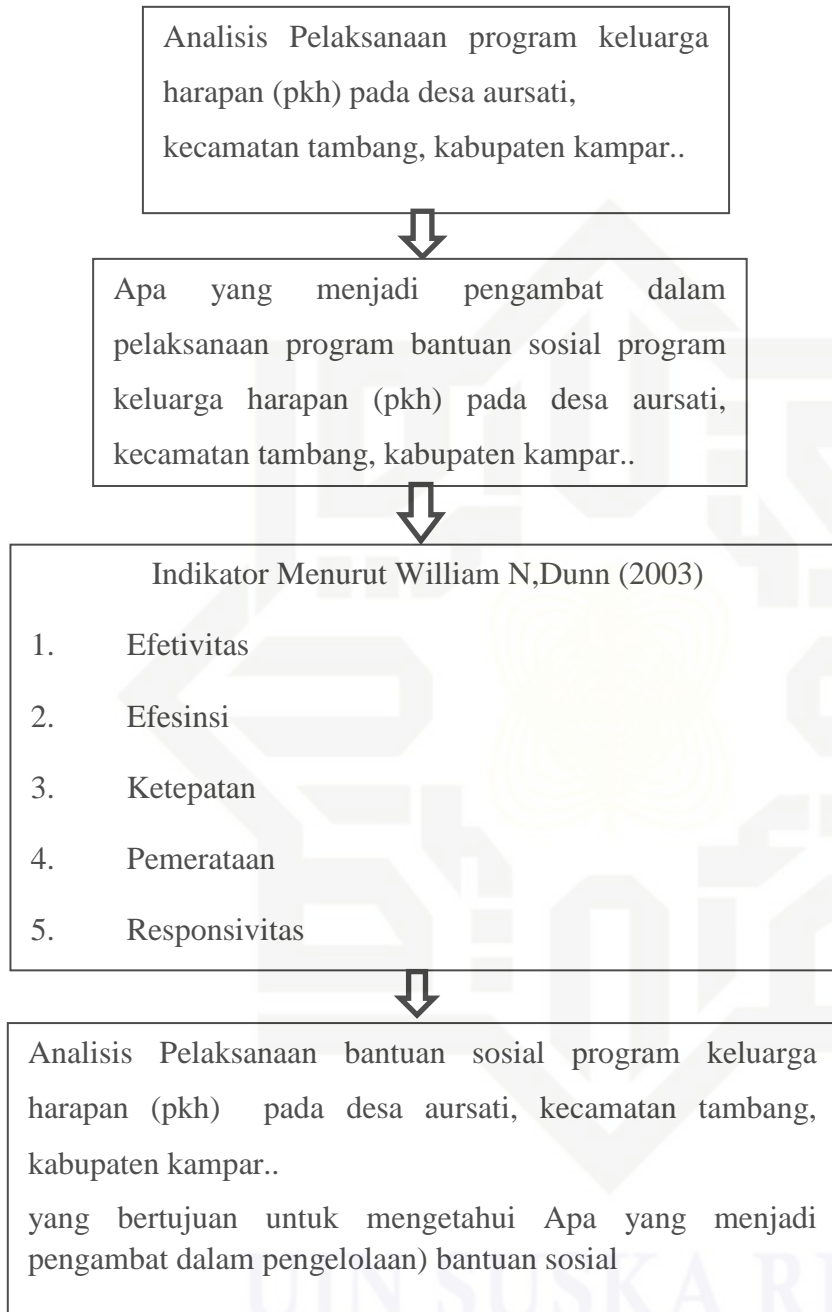
Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Pelaksanaan Program bantuan sosial yang belum merata dan belum tepat sasaran pada desa aursati,kecamatan tambang,kabupaten Kampar. (William N,Dunn 2003).	1. Efektifitas	a) Pencapaian tujuan b) Tepat sasaran
	2. Efisiensi	a) Penggunaan sumber daya secara optimal (waktu biaya tenaga) b) Minimalisir pemborosan
	3. Ketepatan	a) Ketepatan dalam pelaksanaan prosedur
	4. Pemerataan	a) Distribusi sumber daya yang merata b) Akses layanan yang merata di wilayah atau kelompo masyarakat
	5. Responsivitas	a) Kemampuan menanggapi keluhan masyaraat b) Kecepatan waktu dan pelayanan

Sumber :Siregar, R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Barpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Analisis pelaksanaan Program bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat sasaran pada desa aursati,kecamatan tambang, kabupaten Kampar Berdasarkan indicator Efektivitas, efesien, ketepatan, pemerataan, responsivitas.

2.13 Deskripsi Pokus penelitian

a. Efektivitas

Sejauh mana program mencapai tujuan Program bantuan sosial di desa Aursati

b. Efisien

Pemanfaatan dalam pelaksanaan Program bantuan sosial di desa Aursati

c. Ketepatan

Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana dan kebijakan yang ada di desa Aursati

d. Pemerataan

Keadilan dan akses bagi seluruh kelompok masyarakat desa Aursati

e. Responsivitas

Tingkat respon dan partisipasi aktif Masyarakat terhadap program bantuan sosial di desa Aursati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 20 Mei 2025 dan akan berlangsung hingga kegiatan penelitian dinyatakan selesai.

3.2 Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan sudut pandang subjek penelitian.

b. Sumber Data

Agar proses dan hasil penelitian dapat dipercaya dan sesuai, dibutuhkan data yang valid serta relevan dari objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari aktivitas di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian, yaitu para informan yang berada di Desa Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait. Sumber data ini diperoleh dari dokumen, arsip, sumber daring, literatur ilmiah, serta kajian pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari Kantor Desa Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

3.3 Informasi penelitian

Informan atau responden merupakan individu yang memberikan informasi berupa fakta maupun pendapat terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan mencakup individu dan organisasi yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya karena informan dinilai memiliki pengetahuan mendalam dan relevan dengan topik penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara lebih akurat.

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan individu yang memahami kondisi serta situasi terkait objek yang diteliti. Oleh karena itu, pemilihan informan harus memenuhi kriteria tertentu agar data yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi penelitian. Adapun pihak-pihak yang dijadikan sebagai key informan dan informan pendukung akan dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Key informan

No	Informasi Penelitian	Jabatan	Jumbla informasi
1.	Cecep Putra,S.Pd.I	Sekretaris Desa	1 Orang
2.	Lisa Ambrini, Amd	Kaur TU dan Umum Desa aursati	1 Orang
3.	Roma Dona, S.T	Kaur keuangan Desa aursati	1 Orang
4.	Putra	Pendamping pkh	1 Orang
5.	Dahlia	Penerima bantuan sosil(PKH)	1 Orang
6.	Asmar	Penerima bantuan sosil(PKH)	1 Orang
7.	Iyuk	Penerima bantuan sosil(PKH)	1 Orang
8.	Mala	Tidak Penerima bantuan sosil(PKH)	1 Orang
9.	Fitri	Tidak Penerima bantuan sosil(PKH)	1 Orang

Sumber : Data Oleh Peneliti

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan objek penelitian. Dalam studi ini, peneliti menerapkan beberapa cara pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, di antaranya:

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk secara langsung mengamati fenomena di lapangan. Berdasarkan Poerwandari dalam Imam Gunawan (2013:143), observasi adalah metode yang paling kuno dan fundamental karena manusia secara alami sering melakukan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Husaini Usman dalam Hartomo (2017:90) menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang sedang diteliti.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap suatu fenomena atau objek di lokasi



penelitian dengan tujuan memahami kondisi sebenarnya berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab langsung antara peneliti sebagai pewawancara dan narasumber atau informan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak yang menjadi objek penelitian. Menurut Setyadin dalam Imam Gunawan (2013:160), wawancara merupakan percakapan yang difokuskan pada topik tertentu. Pendapat ini juga didukung oleh Husaini Usman dan Purnomo Setiady dalam Hartomo (2017:90), yang menyatakan bahwa wawancara adalah komunikasi lisan secara langsung antara dua orang atau lebih.

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, di mana pertanyaan yang diajukan tidak bersifat kaku atau tetap. Pertanyaan akan berkembang seiring dengan jalannya wawancara, disesuaikan dengan respons dari informan dan kemampuan peneliti dalam menggali informasi lebih dalam. Burhan Bungin (2005:108) menyebutkan bahwa wawancara mendalam adalah proses memperoleh informasi secara tatap muka, dengan atau tanpa panduan pertanyaan, guna mendapatkan data yang lengkap berdasarkan perspektif informan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen sebagai bukti tertulis atau visual terkait objek penelitian. Sugiyono dalam Imam Gunawan (2013:176) menyebut dokumen sebagai catatan peristiwa masa lalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya penting dari seseorang. Bungin dalam Imam Gunawan (2013:177) menjelaskan bahwa dokumentasi dipakai untuk menelusuri data historis dalam penelitian sosial. Guba membedakan antara dokumen dan rekaman (record), di mana record adalah dokumen resmi yang dibuat atas dasar kebutuhan pembuktian atau administrasi, sedangkan dokumen dapat berupa bahan tertulis atau visual yang tidak dibuat atas permintaan penyelidik.

Dengan demikian, dokumentasi adalah proses pengumpulan bukti dari berbagai sumber seperti tulisan, gambar, rekaman, maupun artefak lain yang dapat mendukung dan memperkuat temuan penelitian.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga dapat digunakan untuk menemukan solusi atas masalah yang diteliti.

Analisis data memiliki peran penting dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai evaluasi program bantuan sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program keluarga harapan (pkh) pada desa aursati, kecamatan tambang, kabupaten kampar.. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mengaitkan data di lapangan dengan teori-teori yang relevan. Peneliti menguraikan permasalahan berdasarkan teori, menghubungkan dengan fakta, memberikan penjelasan yang mendukung, serta menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan temuan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Aursati Aursati

Sejarah Desa Aursati bermula sebagai sebuah desa yang tergolong muda, terletak sekitar 3 km dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang di kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Aursati adalah sebuah desa yang tidak terlalu luas yang juga terletak di pinggiran DAS (Daerah Aliran Sungai) sungai Kampar. Desa ini awalnya merupakan bagian dari kenegerian Tambang dan terdiri dari tiga Rukun Kampung, yaitu Rukun Kampung Aursati, Pulau Duit, dan Pulau Tengah. Berdasarkan perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan desa, Desa muda Aursati berubah status menjadi Desa Aursati dengan penggantian Rukun Kampung menjadi dusun.

Pada tahun 2001, Dusun Pulau Duit memisahkan diri dari Desa Aursati karena pemekaran desa, sehingga Desa Aursati terbagi menjadi empat dusun. Kemudian di tahun 2014, Dusun II dimekarkan lagi menjadi dua dusun sehingga total menjadi lima dusun berikut:

1. Dusun I Aursati
2. Dusun II Aursati
3. Dusun III Pulau Tengah
4. Dusun IV Bokuok
5. Dusun V Aursati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarah kepemimpinan desa, Desa Aursati telah dipimpin beberapa kepala desa sejak tahun 1984, dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Abu Dayat (Datuk paduko majo) (1984-1986)
2. Astamar malik, SH (1986-1988)
3. Abbas. B (Datuk Gindo Pado) (1988-1999)
4. Nasrun (Datuk Paduko siajo) (1999-2007)
5. Sukarta (Plt) (2007-2008)
6. Zulfahmi. A (2009-2013)
7. Abd. Razak Dt. Gunung (Plt) (2013-2015)
8. Abd. Razak Dt. Gunung (2015-2021)
9. Mohd. Yanis, S.E.I. (2021 s/d Sekarang)

Nama "Aursati" diambil dari dua kata, "Aur" yang berarti sejenis bambu yang tumbuh di tepi sungai yang biasanya menjadi tempat menambatkan sampan, dan "Sakti" yang berarti bertuah atau berkuasa. Desa ini juga dikenal sebagai tempat kerajaan Tambang dahulu, meskipun peninggalan kerajaan tersebut kini telah hilang akibat runtuhnya tebing sungai dan banjir.

4.2 Keadaan Demografis

1. Batas Wilayah Desa

Desa Aursati memiliki luas wilayah sekitar 1.600 hektar dengan batas wilayah yang mengapit sungai Kampar dan desa-desa tetangga seperti Sungai Pinang, Kualu Nenas, Pulau Permai, dan Padang Luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Luas Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Aursati \pm 1.600 Ha, dimana \pm 200 Ha pemukiman, \pm 415 Ha pertanian sawah/ ladang, \pm 630 Ha perkebunan, \pm 100 Ha rawa-rawa, \pm 0,5 Ha rumah ibadah, \pm 1 Ha perkantoran, \pm 2 Ha sekolah, \pm 250 Ha jalan, dan \pm 1,5 Ha lapangan sepak bola.

Iklim Desa Aursati mempunyai iklim kemarau dan iklim penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Aursati.

3. Orbitasi

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit
- b. Jarak ke ibu kota kabupaten : 25 KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 Menit

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Aursati sebanyak 2.556 orang, dimana terdapat 726 Kepala Keluarga, 1.273 orang laki-laki, dan 1.283 orang perempuan.

4.3 Agama

Penduduk Desa Aursati mayoritas beragama islam yakni 2.556 orang. Tingginya penganut agama islam di Desa ini merupakan hal yang wajar karna agama islam adalah agama penduduk asli di Desa Aursati. Kepercayaan ini sudah menjadi agama yang turun menurun. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Penduduk Desa Aursati Berdasarkan Agama dan Penganutnya

NO	JENIS AGAMA	FREKUENSI	PRESENTASE
1	Islam	2.556	100%
2	Kristen	-	%
3	Budha	-	%
4	Hindu	-	%
Jumlah		2.556	100%

Sumber Data: Profil Desa Aursati 2024/2025

Tabel 4.2
Sarana Ibadah

NO	SARANA IBADAH	FREKUENSI
1	Masjid	5 buah
2	Musholla	5 buah
Jumlah		10 buah

Sumber Data: Profil Desa Aursati 2024/2025

4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu tolak ukur yang menentukan maju atau tidaknya suatu masyarakat, Artinya semakin tinggi tingkat rata-rat pendidikan suatu penduduk akan semakintinggi pula kemajuan yang terdapat di pemukiman itu. Kalau semakin rendah tingkat pendidikan maka akan semakin rendah pula tingkat kemajuannya. Sehingga jika suatu komunitas penduduk ingin maju dan berkembang secara baik maka pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya harus diperbaiki, dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh. Hal ini mulai disadari oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan digiatkannya program-program pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi.

Desa Aursati merupakan Desa yang sangat mementingkan pendidikan. Hal ini terbukti dari timbulnya kesadaran yang secara dari anak-anak yang semulanya ikut orang tuanya mencari nafkah, dengan cara ikut bekerja dan mengerjakan



pekerjaan, mulai berkurang dan berubah masuk sekolah. Setelah mereka menamatkan jenjang Sekolah Dasar, banyak diantaranya yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan ada juga yang sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini terbukti dengan rangka yang menunjukkan tingginya minat anak-anak Desa Aursati yang sekolah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Desa Aursati Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI
1	SD/ MI	1.100 Orang
2	SLTP/ MTs	1.060 Orang
3	SLTA/ MA	600 Orang
4	S1/ Diploma	200 Orang
5	Putus Sekolah	123 Orang
6	Buta Huruf	77 Orang
Jumlah		3.160 Orang

Sumber Data: Profil Desa Aursati 2024/2025

Tabel 4.4
Lembaga Pendidikn di Desa Aursati

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	FREKUENSI	LOKASI
1	Gedung TK/PAUD	2 buah	Dusun I dan II
2	SD/MI	3 buah	Dusun I, II dan IV
3	SLTP/MTs	1 buah	Dusun I
4	SLTA/MA	-	-
5	PDTA	2 buah	Dusun I dan IV
Jumlah		8 buah	

Sumber Data: Profil Desa Aursati 2024/2025

4.5 Mata Pencaharian

Penduduk Desa Aursati memiliki mata pencaharian yang berbedabeda. Namun sebagian besar penduduk Desa Aursati Adalah sebagai petani dan pekebun. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagaimana disebutkan di muka bahwa Desa Aursati juga kawasan perkebunan dan pertanian. Adapun jenis pekerjaan penduduk Desa Aursati pada tabel berikut ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Aursati Berdasarkan Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	FREKUENSI
1	Petani	± 1000 Orang
2	Pedagang	± 500 Orang
3	PNS	± 70 Orang
4	Tukang	± 40 Orang
5	Guru	± 100 Orang
6	Bidan/ Perawat	± 10 Orang
7	TNI/ Polri	± 4 Orang
8	Pesiunan	± 15 Orang
9	Sopir/ Angkutan	± 80 Orang
10	Buruh	± 30 Orang
11	Swasta	± 200 Orang

Sumber Data: Profil Desa Aursati 2024/2025

4.6 Visi dan Misi

1. Visi Desa

“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Aursati Yang Lebih Maju”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Aursati baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Aursati mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

2. Misi Desa

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Aursati yang aman, tentram dan damai.
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.7 Kondisi Pemerintahan Desa

1. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Sekretaris Desa : 1 Orang
- c. Perangkat Desa : 5 Orang
- d. BPD : 11 Orang

2. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- a. LPM : 12 Orang
- b. PKK : 70 Orang
- c. Posyandu : 2 Pos
- d. Pengajian : 8 Kelompok
- e. Arisan : 5 Kelompok
- f. Simpan Pinjam : 1 Kelompok
- g. Kelompok Tani : 6 Kelompok
- h. Ormas : 2 Ormas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Lain-lain : 5 Kelompok

3. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- a. Dusun I Aursati : Jumlah 2 RT/ 2 RW
- b. Dusun II Aursati : Jumlah 2 RT/ 2 RW
- c. Dusun III Pl. Tengah : Jumlah 2 RT/ 2 RW
- d. Dusun IV Bokuok : Jumlah 2 RT/ 2 RW
- e. Dusun V Aursati : Jumlah 2 RT/ 2 RW

4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA AURSATI

KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kantor Desa Aursati

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| Kepala desa | : MOHD. YANIS, S.E.I |
| Sekretaris Desa | : CECEP PUTRA, S.Pd.I |
| Kaur Keuangan | : ROMA DONA, ST. |
| Kasi Pemerintahan | : HASAN BASRI |
| Kaur Perencanaan | : WINDA NUR AFNI |
| Kasi Kesra | : INDRA PERDANA, SH. |
| Kaur Umum | : c |
| Kasi Pelayanan | : MULIANTI |
| Kepala Dusun | |

1. Dusun I Aursati : MUHAMMAD ILYAS
2. Dusun II Aursati : CECEP PUTRA (Pjs)
3. Dusun III Pl. Tengah : ADE DARMAWAN
4. Dusun IV Bokuok : FRAN SETIAWAN BENNY AZMAN
5. Dusun V Aursati : RORI JUNAIDI



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Aursati, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, telah memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima terdaftar melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena ketidaktepatan sasaran, di mana data DTKS yang outdated menyebabkan banyak keluarga miskin rentan terlewat sementara keluarga relatif mampu masih menerima bantuan.

Efektivitas dan Efisiensi Program PKH cukup efektif dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima, dengan dana dimanfaatkan untuk biaya sekolah anak dan pemeriksaan kesehatan, sesuai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan sosial. Efisiensi terganggu oleh keterlambatan pencairan dana dari pusat dan proses verifikasi yang panjang, menyebabkan pemborosan sumber daya waktu serta tenaga pendamping. Meski mekanisme distribusi lokal melalui ketua kelompok relatif optimal, ketergantungan pada data pusat mengurangi dampak keseluruhan.

Ketepatan Sasaran menjadi isu utama, dengan pendataan DTKS yang minim partisipasi masyarakat dan kurang transparan, sehingga keluarga sangat miskin sering tidak terjangkau sementara penerima tidak layak tetap tercantum. Pengaruh relasi sosial lokal dan penghapusan penerima berdasarkan indikator ekonomi tidak akurat memperburuk kondisi ini, memicu konflik sosial dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ketidakpuasan. Verifikasi lapangan yang jarang dilakukan oleh aparat desa dan pendamping PKH menjadi penyebab struktural ketidakcocokan antara data dan realitas lapangan. Pemerataan bantuan belum merata, terlihat dari fluktuasi jumlah penerima (125 KK pada 2024 dari 360 KK miskin), dipengaruhi faktor kekeluargaan dan minim pengawasan, sehingga timbul kecemburuan sosial antarwarga. Responsivitas terhadap keluhan cukup baik di tingkat desa melalui staf dan pendamping, namun lambat untuk isu kompleks seperti ketidakmerataan karena birokrasi kabupaten/pusat. Mekanisme pengaduan tradisional perlu didigitalisasi untuk mempercepat tindak lanjut.

Faktor penghambat mencakup data DTKS tidak valid, beban pendamping berlebih, kurangnya pemahaman penerima terhadap kewajiban, koordinasi lemah antarpihak, dan nilai bantuan tidak mencukupi kebutuhan keluarga besar. Hambatan eksternal seperti infrastruktur jalan sulit juga menyulitkan monitoring rutin. Secara keseluruhan, perbaikan data, pengawasan, dan koordinasi diperlukan agar PKH mencapai pengentasan kemiskinan berkelanjutan di Desa Aursati.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, disarankan agar pemerintah desa bersama pendamping PKH melakukan pembaruan dan validasi data penerima secara berkala untuk memastikan ketepatan sasaran program. Revitalisasi data perlu melibatkan masyarakat, ketua RT/RW, dan tokoh desa agar informasi mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga lebih akurat. Audit lapangan secara rutin sangat penting untuk menilai kembali kelayakan penerima serta menghindari terjadinya pemberian bantuan kepada keluarga yang tidak lagi memenuhi kriteria

kemiskinan. Pemerintah desa juga perlu mengoptimalkan sistem pengaduan agar masyarakat yang merasa layak namun belum terdata dapat menyampaikan keluhan secara langsung dan ditindaklanjuti dengan cepat. Selain itu, pendamping PKH perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendampingan, kemampuan verifikasi, dan pemahaman terkait prosedur serta indikator kemiskinan. Koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pusat juga perlu diperkuat agar proses pencairan bantuan tidak mengalami keterlambatan. Terakhir, transparansi dalam pendistribusian bantuan harus terus ditingkatkan guna mengurangi kecemburuan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program PKH.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2021). *Evaluasi dalam Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hasanah, N. (2023). Indikator Evaluasi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 55–66.
- Hasanah, R., Putri, A., & Yuliani, S. (2020). Evaluasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(1), 101–113.
- Jamaluddin. (2017). *Kemiskinan dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Kharis, A., Sari, M., & Pratama, R. (2024). *Manajemen dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kusaeri, A., dkk. (2022). *Metode Evaluasi Program Publik*. Malang: UMM Press.
- Maipita, I. (2013). *Kemiskinan dan Kesejahteraan*. Medan: USU Press.
- Mayasari, D. (2021). *Konsep Evaluasi dalam Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, H., & Santoso, B. (2016). Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Sosial*, 9(3), 211–225.
- Putri, R., & Wulandari, S. (2020). Ketepatan Sasaran Program PKH. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 77–89.
- Rahmawati. (2019). Kecemburuan Sosial dalam Program PKH. *Jurnal Sosiologi*, 7(1), 44–59.
- Raka Joni, T. (1975). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Siregar, R. (2020). Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengurangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Rumbai Pesisir. *Buku Administrasi Publik*, 15(2), 88–96.
- Andini, S. (2021). Evaluasi Penyaluran Bantuan Tunai (BLT) Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Suka Maju. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 101–110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Chinti, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 77–85.
- Handayani, E. (2020). Evaluasi Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 8(2), 120–133.
- Pandowo, M. (2020). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Manado. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1), 45–58.
- Purnomo. (2021). Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Lansot pada Masa Pandemi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 90–98.
- Putri, N. (2022). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 65–74.
- Rahman, A. (2021). Evaluasi Bantuan Sosial pada Masa COVID-19 di Kota Makassar. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 12(3), 211–223.
- Setiawan, D. (2021). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Suka Maju. *Jurnal Sosial Politik*, 14(2), 133–142.
- Siregar, R. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengurangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Rumbai Pesisir. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 88–96.
- Yuliana, S. (2020). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Suka Maju. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 6(1), 55–64

DOKUMENTASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan warga penerima PKH



Wawancara dengan warga penerima PKH



Wawancara dengan warga penerima PKH



Wawancara dengan warga bukan penerima PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan warga bukan penerima PKH



Wawancara dengan Perangkat Desa Aursati



Wawancara dengan Perangkat Desa Aursati



Wawancara dengan Perangkat Desa Aursati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Sekretaris Desa
Aursati

